

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Regulasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online

Selama ribuan tahun, judi telah menjadi masalah. Di Indonesia, perjudian selalu menjadi masalah. Mulai dari toto gelap, juga dikenal sebagai togel, hingga sekarang, judi online semakin populer. Judi adalah kebiasaan buruk yang telah ada sejak lama. Judi menjadi cara instan bagi sebagian orang untuk menjadi kaya. Perjudian sering terjadi dan dilakukan di tempat yang tidak diharapkan diketahui oleh pihak berwenang, seperti di daerah yang dekat dengan orang dan di mana masalah sosial sering terjadi. Masalah sosial pada dasarnya adalah jika berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masalah-masalah ini mengganggu kehidupan warga dan sangat mengganggu interaksi sosial. Dampaknya akan sangat parah jika tidak dilakukan segera. Negara bertanggung jawab untuk menjamin keamanan hukum, terutama dengan menghapus semua tindak pidana yang bertentangan dengan prinsip dan prinsip ideologi Pancasila. Perjudian *online* adalah salah satu contoh tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Namun, pemberantasan tindak pidana judi online masih jauh dari sempurna saat ini (Maruf Rian Ardiansyah, 2023).

Perjudian merupakan suatu delik kejahatan yang salah satunya diatur dalam pasal 303 KUHP mengatur perjudian sebagai tindak pidana kejahatan. Artinya, perjudian bukan merupakan tindak pidana kejahatan jika dilakukan dengan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (Kartono, 2001). Indonesia sudah memiliki undang-undang yang tegas dalam menangani perjudian *online*. Terdapat pada pasal 303 KUHP dan 303 Bis KUHP, Pasal 303 KUHP lama ini menetapkan sanksi pidana untuk aktivitas bermain judi dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta, sementara Pasal 303 bis KUHP menetapkan sanksi pidana untuk aktivitas bermain judi dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. Pasal ini juga menetapkan ketentuan sanksi pidana untuk perbuatan bermain judi.

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana. Baik secara melawan hukum tersebut dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi tindak pidana baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana. Kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindakan harus memenuhi sifat melawan hukum dan kesalahan (A. Z. A. dan A. Hamzah, 2010).

Sementara UU ITE (Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45) melarang penyebaran konten perjudian melalui media elektronik, yang diancam dengan hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar (Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Lalu perubahan kedua dilakukan melalui UU NO. 1 Tahun 2024, yang memperluas pengaturan dan menambah pasal-pasal baru untuk memperkuat penegakan hukum di ruang digital. Informatika dan Elektronika (ITE) adalah dua bidang yang berhubungan erat tetapi memiliki fokus yang berbeda. Informatika adalah bidang studi yang mempelajari cara menggunakan komputer untuk mengolah informasi. Pemrosesan data, perancangan algoritma, pengembangan perangkat lunak, analisis sistem, dan topik terkait lainnya termasuk dalam kategori ini. Aliran elektron dalam rangkaian listrik dan penggunaan komponen elektronik dalam desain dan pembuatan perangkat elektronik adalah bagian dari bidang ilmu teknik yang dikenal sebagai elektronika. Dalam pengembangan teknologi kontemporer, kedua bidang ini sering bekerja sama satu sama lain. Contohnya, pengembangan perangkat lunak informatika biasanya melibatkan penggunaan perangkat keras elektronika untuk menjalankan aplikasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi kontemporer dimulai dengan kombinasi elektronika dan informasi (Kadir, 2024).

Ada juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan terbaru pemerintah untuk memerangi judi online didasarkan pada perpres ini. Ini menetapkan langkah strategis nasional untuk membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian *Online*. Meskipun Keppres tidak represif seperti UU,

namun fungsinya adalah mempercepat dan mengoordinasikan penegakan hukum secara administratif dan teknis untuk mencegah dan menindak perjudian *online*.

Dalam konteks ini, Menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga bagian: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Jika ketiga komponen ini bekerja sama, penegakan hukum akan berhasil. Struktur hukum mencakup lembaga polisi, kejaksaan, dan pengadilan (Friedman, 1998).

Substansi hukum terdiri dari aturan dan prinsip hukum yang berlaku. Ini adalah dasar dari sistem hukum. Friedman mengingatkan bahwa hukum yang baik pada kertas belum tentu berdampak pada masyarakat jika tidak disertai dengan struktur dan budaya yang mendukung (Friedman, 1998). Sebagai contoh, ada undang-undang yang jelas yang melarang judi *online* di Indonesia, seperti KUHP, UU ITE, dan undang-undang lainnya. Namun, undang-undang ini gagal menghentikan pertumbuhan judi *online*. Ini menunjukkan bahwa aturan tidak cukup.

Friedman berpendapat bahwa struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga administratif seperti Kominfo dan PPATK (Friedman, 1998). Struktur-struktur ini berfungsi sebagai mesin hukum, yaitu mereka yang menggerakkan dan menerapkan hukum dalam praktik. Struktur

yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan masalah, seperti koordinasi yang buruk antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, atau kekurangan sumber daya untuk mengejar kejahatan digital seperti judi *online*. Sebagai contoh, meskipun ribuan rekening telah diblokir oleh PPATK, tindakan penegak hukum kadang-kadang lamban atau tidak menghasilkan pemidanaan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berfungsi dengan baik.

Friedman juga berpendapat bahwa elemen yang sering diabaikan dari hukum adalah budaya hukum, yang mencakup nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum diterima, ditaati, atau dilanggar oleh Masyarakat (Friedman, 1998). Judi *online* masih dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai permainan biasa atau cara mencari uang cepat. Selain itu, kurangnya literasi hukum dan digital memperparah keadaan. Friedman menekankan bahwa hukum tidak akan berfungsi jika masyarakat tidak menghargai atau memahami pentingnya.

Friedman menyatakan bahwa struktur dan budaya hukum masyarakat yang lemah seringkali bertanggung jawab atas kegagalan sistem hukum daripada kekurangan aturan (Chairuni Nasution, 2025).

Berdasarkan analisis diatas, penulis berpendapat bahwa, teori Friedman memberikan perspektif yang sangat relevan dan kontekstual untuk masalah hukum di era digital saat ini. Dalam banyak kasus di Indonesia, terutama yang

berkaitan dengan judi *online*, aturan sudah cukup jelas, tetapi pelaksanaannya masih tersendat. Ini bukan hanya karena hukum yang buruk, tetapi juga karena budaya hukum masyarakat yang belum berkembang dan struktur hukum yang tidak berjalan dengan cepat. Regulasi hukum yang ada saat ini sudah komprehensif, namun masih ada celah di dalam regulasi tersebut, karena tidak adanya regulasi yang menjerat admin, promotor dan penyedia teknis.

Friedman menyarankan kita untuk melihat hukum sebagai sistem yang dipengaruhi oleh perilaku sosial dan lembaga. Jika masyarakat tidak memahami hukum dan aparat penegak hukum tidak bekerja dengan baik, penegakan hukum hanya akan menjadi formalitas, tidak peduli seberapa bagus undang-undang itu. Solusi hukum, berdasarkan teori Friedman, harus tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif dalam penanggulangan perjudian online. Artinya, selain memperkuat penindakan, pemerintah juga perlu membangun sistem kelembagaan yang lebih solid dan memberikan edukasi hukum yang luas kepada masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat dilaksanakan dengan efektif dan menyentuh akar masalah (Prasetya & Rahayu, 2023).

B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*

Penegakan hukum terhadap perjudian online telah mengalami kemajuan yang signifikan di Indonesia. Meskipun ada banyak perangkat hukum yang tersedia, banyak tantangan dan hambatan menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Dalam kamus Estimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang di dekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan (Ngajanan, 1990). Di buku lain, upaya didefinisikan sebagai usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai

tujuan, memecahkan masalah, dan mencari solusi (Kebudayaan, 1988). Beberapa peraturan mengatur perjudian, termasuk judi *online*, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, masih ada banyak kasus yang tidak dapat ditangani sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelaku judi *online* menggunakan media dan server yang berbasis di luar negeri, yang membuat sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi siapa pelaku atau pemilik situs.

Penegakan hukum terhadap perjudian *online* masih menghadapi banyak tantangan signifikan secara praktis. Salah satunya adalah alamat *server* situs judi *online* yang berada di luar negeri. Menurut data Kominfo, situs judi *online* yang menargetkan pemain Indonesia berlokasi di Filipina, Kamboja, atau negara-negara di Eropa. Pemblokiran situs seringkali tidak berhasil karena yurisdiksi hukum Indonesia tidak dapat mencapai wilayah negara lain. Ini terutama berlaku untuk banyak situs yang menggunakan sistem mirroring domain, yang dapat membuat alamat baru jika diblokir. Selain itu, masyarakat menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) untuk membuat upaya pemblokiran tidak efektif; pengguna judi *online* menggunakan VPN untuk menyamarkan lokasi mereka dan menghindari pemblokiran situs oleh Kominfo.

Secara sederhana, teknologi *virtual private network* (VPN) adalah layanan yang memungkinkan pengguna mengakses internet melalui jalur yang aman dan terenkripsi sambil menyembunyikan alamat IP asli pengguna. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat "menyamar" seperti mereka mengakses internet dari negara lain. Penghalang teknis utama dalam pemblokiran situs judi

online adalah penggunaan teknologi *virtual private network* (VPN) dan sistem mirroring domain. Laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Judi *Online* tahun 2024 menunjukkan bahwa lima puluh persen orang yang bermain judi online menggunakan VPN, ini memungkinkan pelaku menghindari pemblokiran kominfo (Pramudhiaz, 2023). Namun, masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi digital adalah korban utama dari budaya hukum. Banyak orang masih menganggap platform tersebut sebagai "investasi" atau "permainan biasa", tanpa menyadari bahwa mereka terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan digital akan selalu tertinggal satu langkah dari penegakan hukum jika tidak ada pelatihan yang cukup.

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, karena sejumlah masalah teknis seperti *hosting* di luar negeri dan penggunaan VPN, koordinasi yang lemah antarlembaga, dan kurangnya literasi digital masyarakat, penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia ini masih belum berhasil. Penegakan hukum harus berbasis preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), berdasarkan teori friedman, masalah utama penegakan hukum terhadap perjudian *online* bukanlah kekurangan regulasi. Sebaliknya, masalahnya terletak pada ketidakefektifan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat yang lemah. Dinamika teknologi, kelembagaan, dan kesadaran sosial sangat memengaruhi hukum. Meskipun peraturan baru atau hukuman yang lebih berat tidak akan cukup untuk mengatasi masalah judi *online*, penguatan sistem penegakan hukum juga diperlukan, termasuk kerja sama

internasional, pembaruan teknologi yang digunakan untuk memantau siber oleh aparat, dan pendidikan hukum dan digital yang luas di masyarakat. Jika ketiga komponen sistem hukum Friedman ini dapat bekerja sama, penegakkan hukum terhadap perjudian online akan lebih efektif dan bertahan lama.